
ANALISIS SEMIOTIKA KONFLIK IDEOLOGI (ANALISIS SOSIOLOGI MEDIA PADA FILM “JENDERAL SOEDIRMAN”)

Lasarus Jehamat¹ Rudolof Ngalu², Laurensius D.E.P. Putra³

¹Jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang

²Prodi PGSD FKIP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

³Jurusan Sosiologi Fisip Undana Kupang

Email: lasarusjehamat78@gmail.com¹ ngalurudolf@gmail.com²
laurensiusudputra26@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Semiotika Tentang Konflik Ideologi (Analisis Sosiologi Media Pada Film “Jenderal Soedirman”). Penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa semua hal termasuk film tidak luput dari proses dan relasi kekuasaan. Kehadiran film memiliki tujuan dan karena itu memiliki makna tertentu pula. Penelitian ini berfokus pada analisis konflik antarideologi dalam film “Jenderal Soedirman”. Disebutkan, dalam film tersebut, konflik sering terjadi di beberapa segmen. Semua konflik tentu dilandasi oleh akar dan sebab tertentu. Demikian pula, setiap konflik selalu memiliki dinamika tertentu. Apa pun alasannya, dinamika konflik entah secara sosial maupun secara simbolis dalam film memiliki makna tertentu. Oleh karena itu, dinamika konflik yang terjadi dapat dianalisis dan laik diperiksa. Kajian menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf. Analisis penelitian ini menggunakan konsep interpretatif kualitatif. Metode yang dipakai sebagai mesin analisis menggunakan metode semiotika Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes memfokuskan analisis tanda dengan melihat pada denotasi, konotasi dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan sejumlah konflik ideologi yang terjadi dalam film tersebut. Beberapa di antaranya ialah konflik antara ideologi nasionalisme sempit (*chauvinism*) vs fasisme, antara nasionalisme vs kolonialisme, antara nasionalisme vs komunisme, dan konflik komunisme vs kolonialisme. Pemahaman akan konflik ideologi urgen dianalisis agar masyarakat tidak dimanipulasi oleh beragam ide dan gagasan yang muncul dari rezim tertentu dapat segera diatasi.

Kata Kunci: film, Semiotika, konflik dan konflik ideologi.

SEMIOTIC ANALYSIS OF IDEOLOGY CONFLICT (MEDIA ANALYSIS OF SOCIOLOGY IN GENERAL SOEDIRMAN'S FILM)

Abstract

This research is entitled Semiotic Analysis of Ideology Conflict (Media Analysis of Sociology in General Soedirman's Film). This research is based on the consideration that all things including films are not immune to the process and power relations. The presence of a film has a purpose and therefore has a certain meaning. This research focuses on the analysis of interarideological conflicts in the film General Soedirman. It is said, in the film, conflicts often occur in several segments. All conflicts are certainly based on certain roots and causes. Likewise, every conflict always has a certain dynamic. Whatever the reason, the dynamics of the conflict whether socially or symbolically in the film has a certain meaning. Therefore, the dynamics of the conflict can be analyzed and worth checking. The study uses Ralf Dahrendorf's conflict theory. The analysis of this study uses a qualitative interpretive concept. The method

used as an analytical machine uses the Roland Barthes semiotics method. Roland Barthes' semiotics focuses the analysis of signs by looking at denotations, connotations and myths. The results showed a number of ideological conflicts that occurred in the film. Some of them are conflicts between narrow ideology of nationalism (chauvinism) vs. fascism, between nationalism vs. colonialism, between nationalism vs. communism, and communism vs. colonialism conflict. Understanding of ideological conflicts is urgently analyzed so that people are not manipulated by various ideas and ideas that emerge from certain regimes can be immediately overcome.

Keywords: *films, semiotics, conflict and ideological conflict.*

PENDAHULUAN

Berbagai konflik, baik bersifat langsung maupun tidak langsung yang mengatasnamakan ideologi tertentu digambarkan dalam film "Jenderal Soedirman". Bahkan, konflik akibat gesekan kepentingan dan ketidaksamaan pikiran terjadi dan berujung pada kontak fisik yang mengatasnamakan sebuah ideologi tertentu dengan pertimbangan logisnya maupun tentang simpatisan penganut ideologi. Akhirnya, mereka juga harus terseret dalam arus konflik dan hanya menjadikan ideologi sebagai tameng kepentingan demi keselamatan semata.

Film Soedirman tidak hanya menceritakan perjuangan Soedirman (Adipati Dolken) belaka. Meskipun Viva Westi mengagumi "Jenderal Soedirman", ia masih melihat tokoh fiksi, yaitu Karsani (Gogot Suryanto), yang kehadirannya menimbulkan banyak pertanyaan. Menurut Viva, tokoh Karsani mewakili rakyat. Hal ini disebabkan karena terdapat rakyat yang turut berjuang serta sebagai penghormatan pada pusara pahlawan tak bernama.

Film "Jenderal Soedirman" dimulai dari Soedirman dipilih sebagai panglima tertinggi TNI hingga diajak bergabung oleh Tan Malaka (Mathias Muchus). Tan Malaka dianggap sebagai tokoh komunis. Perjuangannya selalu berseberangan dengan semua tokoh bangsa masa itu. "Jenderal Soedirman" pun sempat beradu gagasan kebangsaan dengan Tan Malaka, namun ia tetap teguh pada pendirian nasionalismenya.

Kisah ini berlanjut ketika Belanda melancarkan Agresi II (1948) dengan

melanggar perjanjian Renville. Perjanjian Renville berisikan pemberhentian gencatan senjata antara Republik Indonesia dengan Belanda. Agresi ke II Belanda dipimpin oleh Jenderal Simon Spoor dengan satu tujuan mengembalikan kolonialisme. Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan terhadap Republik Indonesia melalui Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia saat itu. Belanda bertujuan menangkap pemimpin-pemimpin pemerintah, merobohkan pemerintah Republik Indonesia, serta menggoncang NKRI dan TNI.

Hari itu juga "Jenderal Soedirman" meninggalkan Yogyakarta dan memulai perjalanan gerilya selama kurang lebih tujuh bulan lamanya. "Jenderal Soedirman" menerapkan sistem perang gerilya dari luar ibu kota sehingga mampu menghambat dan membuat tentara Belanda Belanda kewalahan. Bagi seorang yang masih sakit, perjalanan naik turun gunung, keluar masuk hutan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukanlah perjalanan yang ringan. Obat-obatan yang sulit diperoleh membuat "Jenderal Soedirman" kekurangan makanan dan obat-obatan. Selain itu, Belanda selalu berusaha menangkapnya.

Film "Jenderal Soedirman" menampilkan keadaan militer Indonesia sangat rapuh. Hal ini dilihat melalui keberadaan tokoh Karsani, juga militer tidak dibentuk oleh satu garis komando. Selain itu, ada bekas tentara Kolonial Belanda (KNIL), terdapat eks PETA (Pembela Tanah Air), dan satuan bentukan Jepang seperti

Soedirman. Bahkan, ada pula tentara tidak terlatih. Hal ini ditunjukkan saat Karsani datang bergabung. Pertanyaan yang diberikan, “Apakah pernah ikut latihan militer atau berperang?” Jawaban yang diberikan, yakni “tidak”. Film Soedirman juga menampilkan tentara Indonesia beragam. Pergolakan telah menciptakan banyak tentara. Hal ini dibuktikan dengan adanya tentara merah (komunis) dan tentara liar. Selain itu, di samping TNI sebagai tentara nasional terdapat juga tentara yang berasal dari aliran berbeda, mulai dari nasionalis, komunis, sampai kolonialis.

Semiotika Roland Barthes

Roland Barthes dikenal sebagai salah satu pemikir strukturalis yang rajin mempraktikkan model linguistik Saussurean. Barthes juga merupakan intelektual dan kritikus Perancis ternama; eksponen penerapan strukturalisme dan semiotika pada sastra. Barthes berpendapat bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang menjelaskan asumsi-asumsi dari masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Barthes mengajukan pandangan ini dalam *Writing Degree Zero* (1953) dan *Critical Essay* (1964) (Sobur, 2009). Tujuan analisis ini bukan untuk membangun suatu sistem klasifikasi unsur narasi yang sangat formal, namun untuk menunjukkan tindakan yang paling masuk akal. Rincian yang paling meyakinkan atau teka-teki yang paling menarik merupakan produk buatan dan bukan tiruan dari yang nyata.

Denotasi lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna sedangkan konotasi identik dengan operasi ideologi, yang disebut Barthes sebagai “mitos” berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu (Sobur, 2009). Menurut Barthes, mitos berada di wilayah pertandaan tingkat kedua atau tingkat konotasi bahasa. Konotasi itu pun dijadikan olehnya sebagai denotasi mitos dan mitos ini mempunyai

konotasi terhadap ideologi tertentu. Konotasi merupakan aspek bentuk bahasa dan mitos adalah muatannya. Barthes mengatakan bahwa penggunaan konotasi dalam teks sebagai pencitraan mitos.

Teori Barthes tentang mitos ini memungkinkan pembaca melakukan pengkajian ideologi secara sinkronik maupun diakronik. Secara sinkronik, makna terbentuk pada suatu titik sejarah dan seolah berhenti di titik tersebut. Sementara secara diakronik analisis Barthes memungkinkan untuk melihat kapan, di mana, dan dalam lingkungan apa sebuah sistem mitos digunakan. Tanda denotatif menurut Barthes terdiri dari penanda (signifier) dan petanda. Saat yang bersamaan penanda denotatif juga merupakan penanda konotatif. Jadi menurut Barthes, tanda konotatif tidak hanya sekedar memiliki makna tambahan, namun juga mengandung kedua tanda denotatif yang melandasi keberadaannya.

Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Bagi Dahrendorf (Ritzer dan Goodman, 2014), tugas pertama analisis konflik adalah menganalisis beragam peran otoritas dalam masyarakat. Dahrendorf menentang mereka yang bergerak pada level individu. Otoritas dalam setiap asosiasi bersifat dikotomis. Hanya dua kelompok konflik terjadi dalam asosiasi manapun. Para pemegang otoritas dan mereka yang berada di posisi subordinat memiliki kepentingan yang substansi dan arahnya berlawanan.

Konsep teori ini adalah wewenang dan posisi. Keduanya merupakan fakta sosial. Inti tesisnya, yakni distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa kecuali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis. Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat. Perbedaan posisi serta perbedaan wewenang di antara individu dalam masyarakat itulah yang harus menjadi perhatian utama para sosiolog.

Struktur yang sebenarnya dari konflik-konflik harus diperhatikan di dalam susunan peranan sosial yang dibantu oleh harapan-harapan terhadap kemungkinan mendapatkan dominasi. Tugas utama menganalisis konflik adalah mengidentifikasi berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat (Ritzer: 2010). Posisi tertentu dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya bahwa perbedaan didistribusikan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.

Film Soedirman menghadirkan konflik parsial yang dilahirkan oleh keinginan menguasai. Artinya, baik Republik Indonesia dengan sistemnya maupun kerajaan Belanda dengan kolonialismenya memiliki keinginan untuk mendapatkan tempat secara mutlak dalam satu area yang sama. Konflik persial sebab sebagian dari pribumi ingin menguasai Indonesia dengan sistem yang berbeda. Karena itu, terdapat kepentingan yang menurut Dahrendorf, menjadi dasar sebuah konflik.

Film

Film adalah media elektronik paling tua dari media lainnya. Film telah berhasil mempertunjukkan gambar-gambar hidup yang seolah-olah memindahkan realitas sosial asli ke atas layar besar. Saat ini, film telah diciptakan sebagai salah satu media komunikasi massa. Fungsinya demikian menjadikan film benar-benar disukai banyak orang sampai sekarang. Menurut Liliweri (1991), lebih dari 70 tahun terakhir, film telah memasuki kehidupan umat manusia yang sangat luas. Itulah alasan mengapa film sering dijadikan media untuk menjelaskan dan menggambarkan fakta. Sisi lain, film merupakan ekspresi hati manusia, termasuk film sejarah. Film sejarah menampilkan dialog fiksi. Film berfokus pada dialog utama sehingga biasa disebut improvisasi.

Tataran lain, film merupakan media penyampaian pesan massa yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikannya. Komunikator akan sangat mudah menjelaskan maksud dari pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan melalui film. Hal ini yang menggambarkan film terdiri dari suara (*audio*) dan gambar (*visual*).

Sebagai media komunikasi massa, film berfungsi sebagai sarana penanaman atau penyebaran paham mengenai nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Fungsi tersebut sering disebut sebagai sosialisasi. Sosialisasi adalah sebuah kegiatan yang mengacu pada cara individu mengadopsi perilaku dan nilai dari suatu individu maupun suatu kelompok (Ardianto, dkk: 2009).

Effendy (2000) mengemukakan bahwa teknik perfilman, baik peralatan maupun pengaturannya telah berhasil menampilkan gambar-gambar yang semakin mendekati kenyataan. Suasana gelap di bioskop, penonton menyaksikan suatu cerita yang seolah-olah benar-benar terjadi dihadapannya. Karena itu, film sangat digemari. Dengan kata lain, semakin realistis suatu film, semakin banyak penontonnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini muncul karena terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu realitas, fenomena, atau gejala. Artinya bahwa dalam paradigma ini, realitas sosial dipandang sebagai suatu yang holistik atau utuh, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Menurut Sugiyono (2005), jenis penelitian kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada

generalisasi. Objek yang alamiah, yaitu objek apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi saat peneliti memasuk, ada, dan keluar dari objek relatif tidak berubah.

Metode penelitian ini juga digunakan untuk mendapatkan suatu data mendalam yang mengandung makna. Artinya, metode ini menghadirkan data yang sebenarnya, data yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Penelitian ini terfokus pada konflik ideologi yang melibatkan massa. Kajian penelitian ini menggunakan semiotika Roland Barthes. Target penelitian ini adalah film "Jenderal Soedirman". Peneliti menggunakan teori konflik Ralf Dahrendorf untuk mempermudah analisis dalam riset tersebut.

Semiotika Roland Barthes berfokus pada tiga hal pokok. Di antaranya, denotatif, konotatif, dan mitos. Tanda denotatif, terdiri dari penanda dan petanda. Akan tetapi pada saat yang bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda konotatif. Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak hanya sekedar memiliki makna tambahan. Namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya (Sobur, 2009).

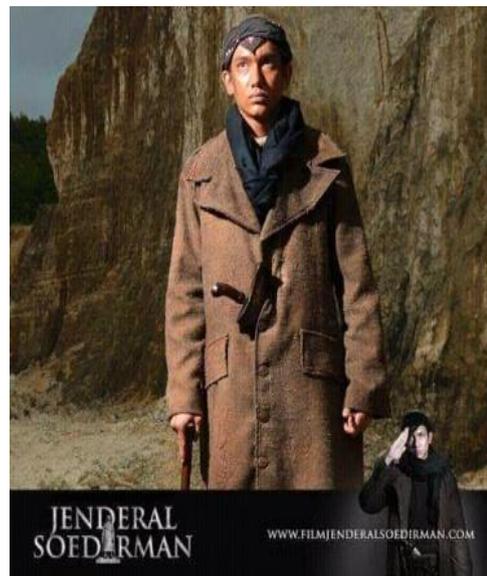
Dengan kata lain, Barthes memiliki konsep bahwa tanda konotatif tidak sekedar memiliki makna tambahan, tetapi juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. Sesungguhnya, inilah sumbangan Barthes yang sangat berarti bagi penyempurnaan semiologi Saussure yang berhenti pada penandaan dalam tataran denotatif (Sobur, 2009). Barthes mengembangkan semiotika menjadi tingkatan pertandaan denotasi dan konotasi. Denotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda pada realitas, menghasilkan makna eksplisit, langsung, dan pasti. Konotasi adalah tingkat pertandaan yang menjelaskan hubungan penanda dan petanda yang di dalamnya beroperasi makna yang

tidak eksplisit, tidak langsung, dan tidak pasti.

Sementara itu, Charles Sanders Peirce mendefinisikan semiotik sebagai suatu hubungan di antara tanda, objek, dan makna (Littlejohn, 1996). Artinya bahwa semiotika adalah suatu metode yang melihat bagaimana suatu hubungan antara tanda, objek, dan sebuah makna. Selain itu, semiotika dapat diartikan sebagai penarikan kesimpulan. Namun, tidak akan selalu yang diartikan sama dengan apa yang akan dibahas secara lain karena di dalam semiotik terdapat makna yang denotatif dan juga konotatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis peneliti adalah dialog dari tiap sign. Dialog yang dimaksud berisikan tentang konflik antara ideologi yang kemudian melibatkan massa.



Gambar 1. Adipati Dolken dalam film "Jenderal Soedirman"

Film "Jenderal Soedirman" menampilkan konflik yang dipertontonkan secara gamblang. Pemikiran Dahrendorf bahwa film berfokus pada struktur sosial yang lebih besar. Inti tesis Dahrendorf menyatakan bahwa berbagai posisi di masyarakat memiliki otoritas yang berlainan. Otoritas tidak terdapat dalam individu, melainkan posisi.

Dahrendorf tidak tertarik pada struktur posisi-posisi ini, namun juga pada konflik antarmereka (Ritzer dan Goodman: 2014).

Adegan sebelum Agresi Militer Belanda ke Yogyakarta

Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014) mengatakan bahwa konflik tidak akan terjadi apabila konsensus tidak terjadi. Soedirman dan Sutan Sjahrir berasal dari latar belakang ideologi yang berbeda. Meskipun ideologi yang dianut Sutan berisi chauvinism, mereka terpaksa bersatu dalam satu ideologi karena menghadapi musuh yang sama. Dalam adegan ini Sutan Sjahrir menolak Soedirman sebagai Panglima Besar. Ia mengatakan bahwa Soedirman adalah eks-PETA, bentukan Jepang. Ia juga mengatakan bahwa semua kolaborator Jepang harus disingkirkan. Sjahrir takut bahwa Indonesia akan berakhir sebagai negara fasis.



Gambar 2. Terpilihnya Soedirman sebagai panglima tertinggi ABRI,00:00:44-00:01:08

Jepang sangat berpengaruh di Indonesia dengan paham fasismenya sehingga dinilai sangat mengkhawatirkan. Sjahrir beranggapan bahwa fasisme dapat saja menggeser pemahaman kebangsaan. Tentu saja bukan hanya karena paham itu berlainan dengan tokoh perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi, mengubah cara pandang negara, sama dengan mengubah haluan dalam menjalankan

negara tersebut. Apabila dibiarkan, akan menyebabkan kekacauan dalam dunia politik dan sosial.

Menurut Dahrendorf, otoritas bukanlah sesuatu yang bersifat konstan. Karena otoritas terletak pada posisi, bukan pada orang. Jadi, seseorang yang memegang otoritas pada satu *setting*, tidak berarti menduduki posisi sebagai pemegang otoritas pada *setting* yang lain (Ritzer dan Goodman: 2014). Hal ini terjadi pula pada Sutan Sjahrir yang kala itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Sjahrir mengkritik tegas keputusan pemerintah tentang pengangkatan Jenderal Soedirman. Akan tetapi, Sjahrir tidak memiliki andil kuat untuk membatalkan keputusan tersebut mengingat Soedirman dipilih pada masa darurat. Selain itu, Soedirman dipilih dengan cara demokrasi. Artinya, terpilihnya Soedirman dikarenakan sebagai bentuk kesepakatan otoritas suara dominan.

Sebagian kasus, nasionalisme disalahartikan dan memicu pertikaian. Pertikaian tersebut berbuntut anarkisme. Entah itu dalam bentuk konflik bersenjata, kerusuhan dengan isu SARA, isu peperangan menyangkut kedaulatan negara, dan sebagainya (Pureklolon: 2017). Hal tersebut menjadi ketakutan Sutan Sjahrir. Jiwa nasionalismenya aktif, dengan tujuan mencekal pengaruh paham asing (fasisme) memiliki tempat.

Adegan film Soedirman menampilkan hal tersirat yang menyatakan bahwa Sjahrir menginginkan pemimpin tentara dari kaum nasionalis murni. Artinya, Sjahrir ingin negara ini bersih dari unsur penjajah dan paham penindasan manapun. Akan tetapi, otoritas selalu berarti subordinasi dan superordinasi. Mereka yang menduduki posisi otoritas diharapkan akan mengendalikan subordinat. Jadi, mereka mendominasi karena harapan dari mereka yang mengelilinginya bukan karena karakteristik psikologisnya (Ritzer dan Goodman:2014).

Soedirman mendapatkan posisi otoritas dari prajurit yang memilihnya.

Kondisi tersebut diperkuat oleh situasi darurat militer Republik. Tidak menutup kemungkinan, sikap Sjahrir akan sama apabila yang menjadi panglima besar adalah Oerip Soemohardjo. Biar bagaimanapun, Oerip juga merupakan tentara Indonesia eks-KNIL.

Hubungan Soedirman dan Sjahrir sempat menegang. Hal ini dikarenakan Sjahrir bercita-cita agar tentara Indonesia bebas dari unsur fasisme Jepang. Dalam risalah politik Sjahrir, *Perdjoeangan Kita* cetakan pertama (November 1945), Ia menggunakan kata “anjing-anjing yang berlari”. Istilah itu Sjahrir berikan kepada kaum yang bekerjasama dengan Jepang (Seri Buku Tempo: 2016).



Gambar 3. Pernyataan sikap Sutan Syahrir terhadap hasil demokrasi dikalangan militer. 00:01:32-00:01:46

Sikap Sjahrir diartikan sebagai chauvinisme atau jingoisme. Jingoisme adalah sikap semangat mengorbankan untuk melawan bangsa lain. Chauvinisme adalah rasa kebangsaan yang bertindak agresif terhadap bangsa lain. Contoh konkritnya adalah perkembangan nasionalisme bangsa Eropa dan Amerika Utara. Dikap chauvinistis dan jingoistis ini maka lahirlah imperialisme. Suatu bangsa tidak hanya ingin mengalahkan bangsa lain, tatapi juga menguasai wilayah dan rakyatnya (Pureklolon: 2017). Hal

tersebut akan terjadi karena sifat dasar manusia yang tidak pernah puas.



Gambar 4. Soedirman ketika jejak pendapat dengan Tan Malaka 00:02:01-00:02:42

Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014), beranggapan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah unit. Ia menyebutnya dengan “asosiasi yang ditata berdasarkan perintah”. Semua itu dapat dilihat sebagai asosiasi orang yang dikendalikan oleh hirarki posisi otoritas. Masyarakat berisi begitu banyak asosiasi. Soedirman berada pada otoritas militer, yaitu di bawah perintah panglima tertinggi. Film “Jenderal Soedirman menampilkan posisi Sjahrir sebagai perdana menteri dan bertugas mengurus ketatanegaraan dan pemerintahan. Sementara itu, Soedirman adalah panglima besar yang di bawah pengawasan langsung Menteri Pertahanan dan perintah Presiden. Hal ini berarti Sjahrir tidak bisa menyentuh secara langsung otoritas “Jenderal Soedirman”.

Sesungguhnya, individu dapat memegang otoritas pada satu asosiasi dan berada pada posisi subordinat asosiasi lain. Sekalipun dalam faktanya, Sjahrir sebagai Perdana Menteri menunjuk Amir Sjarifudin sebagai Menteri Pertahanan. Keputusan Sjahrir tersebut bertentangan dengan kesepakatan rapat Gondokusumo yang memutuskan Sultan sebagai Menteri Pertahanan.

Cara pandang Sjahrir tentang antek penjajah sangat tidak realistis. Mengingat tentara yang siap berperang adalah eks-didikan penjajah. Seharusnya hal ini tidak dilakukan oleh seorang yang terhormat seperti Bung Sjahrir. Tidak menjadi masalah seorang belajar pada orang asing. Hal terpenting adalah hatinya masih mempunyai jiwa nasionalis. Karena itu, orang tersebut akan tetap menjadi jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Seharusnya sebagai seorang Perdana Menteri, Bung Syahrir harus lebih bersifat adil. Sjahrir seharusnya tidak membedakan latar belakang para antek penjajah. Hal yang terpenting adalah rasa cinta terhadap tanah air.

Adegan Saat Agresi Militer Belanda Ke-II di Yogyakarta

Adegan ini berisi polemik kedudukan Indonesia dan Belanda. Terjadi perdebatan antara Cochran dan Scurman (kediaman Schurman). Scurman menyatakan bahwa Indonesia adalah Hindia Belanda. Pernyataan itu dapat diartikan bahwa Indonesai adalah bagian dari Kerajaan Belanda, yakni sebagai negara jajahan.

Dahrendorf mengakui bahwa masyarakat tidak mungkin ada tanpa konflik dan konsensus. Jadi, kita tidak mungkin berkonflik tanpa konsensus sebelumnya (Ritzer dan Goodman: 2014). Scurman mengatakan bahwa Indonesia adalah Hindia Belanda. Dengan kata lain, Indonesia adalah daerah kolonial Belanda. Berdasarkan pernyataan Schurman, maka perlu dilakukan pengintegrasian melalui pendudukan. Salah satu upaya pendudukan itu adalah melalui agresi militer. Agresi militer memungkinkan terjadinya konflik dengan kelompok yang menentang pengintegrasian tersebut.

Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014) mengatakan bahwa individu disesuaikan atau diadaptasikan pada peran mereka ketika menyumbang konflik antara superordinat dan subordinat. Peneliti beranggapan bahwa Elink Schurman yang merupakan delegasi Belanda di

KTN dan menjadi salah satu penyumbang konflik. Schurman mengatakan dalam dialognya bahwa Indonesia adalah Hindia Belanda. Dengan kata lain, pendudukan yang dilakukan adalah hal yang dianggap sah-sah saja. Hal tersebut kemudian memunculkan polemik dengan Cochran.



Gambar 5. Pengumuman di radio. 00:14:57-00:15:45

Sikap Schurman yang apatis melahirkan konflik laten lainnya. Akhirnya, timbul pertanyaan menggantung, bagaimana Belanda mengatakan Indonesia sebagai Hindia Belanda, terutama di atas kemerdekaan Indonesia? Alasannya bahwa Indonesia telah merdeka terlebih dahulu. Selain itu, Indonesia memiliki pegakuan kemerdekaan dari berbagai negara di dunia. Kemerdekaan dan pengakuan ini, membuat Schurman dengan egonya mengatakan bahwa Indonesia adalah Hindia Belanda. Oleh karena itu, menurut peneliti agresi militer Belanda ke II adalah invasi militer suatu negara terhadap negara yang lain ditambah lagi dengan keinginan untuk melakukan kolonialisasi terhadap Republik Indonesia.

Menurut Anderson (1983), nasionalisme merupakan tindakan masyarakat merujuk pada pengabdian dan loyalitas terhadap negara dan bangsanya. Nasionalisme sangat diperlukan dalam upaya menghentikan kolonialisme. Oleh karena itu, siaran radio dengan sematan nama Soedirman dapat dijadikan patokan mengingat ia

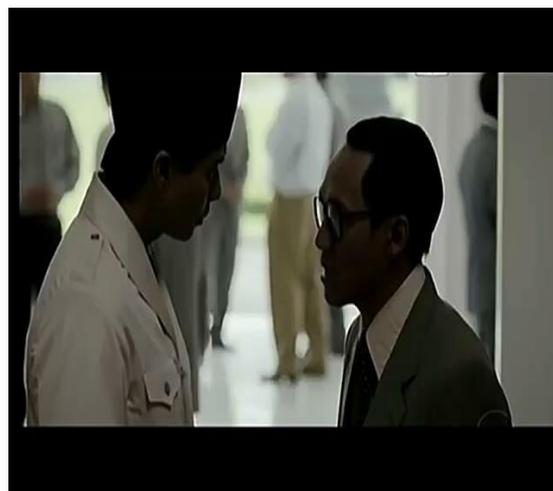
adalah seorang nasionalis dan memiliki posisi penting yang strategis. Peneliti beranggapan, Soedirman menyadari untuk berperang pun rakyat dan prajurit butuh alasan. Perang tanpa alasan adalah buta. Mengandalkan loyalitas sebagai bukti nasionalisme, tidak membuat suatu negara berhasil mengusir penjajah. Karena itu, dibutuhkan pengabdian untuk membuktikan bahwa loyalitas itu ada.

Masyarakat dipersatukan oleh kekangan yang dilakukan dengan paksaan (Rizer dan Goodman: 2014). Peneliti beranggapan bahwa siaran radio dalam adegan tersebut adalah sebuah kekangan dan paksaan. Kekangan dan paksaan tersebut tidak hanya berasal dari legitimasi dan perintah Soedirman. Posisi Soedirman sebagai Panglima Besar adalah alasannya. Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014) mengatakan bahwa otoritas tidak terdapat dalam individu, melainkan pada posisi. Hal ini berarti bahwa Soedirman mengandalkan otoritas dari posisinya untuk menggalang kekuatan. Selain himbuan melalui radio, juga perintah perlawanan terhadap kolonialisme.

Peneliti melihat bahwa konflik dalam adegan tersebut, terjadi secara manifest dan laten. Secara manifest, konflik terjadi ketika terdapat himbuan dan perintah gerilya dari radio. Himbuan dan perintah tersebut menunjukkan bahwa keadaan Republik sedang genting. Jiwa nasionalisme diperlukan apabila hendak mencegah kehancuran fisik yang mendekat. Secara laten, konflik ideologi terjadi saat ancaman dikabarkan dari siaran radio tersebut. Ancaman berasal dari isi siaran radio bahwa terjadi agresi militer Belanda ke-2. Bahkan siaran tersebut menyiratkan keharusan yang laten bahwa jiwa nasionalisme Indonesia harus berkonflik dengan konsep kolonialisme Belanda. Secara sejarah, Belanda dengan kolonialismenya pernah menyengsarakan rakyat Indonesia. Bahkan, setelah merdeka-pun, Belanda masih ingin menegakan kolonialismenya di Indonesia.

Terbayang masa kegelapan dan tersambar api nasionalisme yang membara, diharapkan siaran radio tersebut menjadi pemantik perjuangan rakyat semesta.

Dialog Moh. Hatta



Gambar 6. Perjumpaan Soekarno dan Hatta
00:13:19-00:13:30

Pernyataan Hatta tersirat makna bahwa Belanda menyerang Indonesia. Penyerangan itu dilakukan dengan mengabaikan delegasi sidang KTN (Komisi Tiga Negara) dan kesepakatan tentang gencatan senjata.

Ketika merdeka tahun 1945, perjuangan rakyat Indonesia belum selesai. Fakta urgennya ketika agresi militer Belanda II pada 1945-1946. Nasionalisme Indonesia benar-benar diuji di tengah gejolak politik (Suhartono: 2001). Adegan ini menampilkan Hatta mengatakan Belanda tidak tahu malu. Hal ini dapat dilihat bahwa nasionalisme Hatta terbakar lantaran pengkhianatan Belanda. Selain itu, Belanda melanggar sendiri perjanjian gencatan senjata dengan Republik. Upaya Kolonisasi kembali dilakukan. Cara paling ampuh adalah melakukan invasi. Akan tetapi, Belanda sepertinya tidak menghiraukan semangat nasionalisme rakyat merdeka.

Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014) mengatakan bahwa kelompok kepentingan menurut pengertian sosiologi adalah agen

sesungguhnya dari konflik kelompok. Belanda merasa perlu menegakkan kembali kolonialismenya di bumi nusantara. Oleh karena itu, Belanda melancarkan serangan masif dalam agresinya yang ke-2. Akan tetapi, dalam adegan ini Hatta sebagai salah satu perwakilan Republik mengatakan Belanda tidak tahu malu mengingat Indonesia telah merdeka serta dibentuknya perjanjian gencatan senjata. Hal tersebut telah dilanggar sendiri oleh Belanda. Dengan demikian konflik tidak bisa dihindari lagi.

Menurut peneliti, masing-masing kelompok yang bertikai, berusaha memperebutkan otoritas pada posisi tertentu. Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014) mengatakan bahwa otoritas tidak terdapat pada individu melainkan pada posisi. Posisi yang diperebutkan adalah mengenai siapa yang dapat menjadi tuan atas Nusantara. Dengan demikian, otoritas sebagai penguasa tentu juga akan didapat. Apabila Belanda berhasil mendapatkan posisinya kembali, maka kolonialisme akan bercokol di Indonesia. Hal tersebut telah diketahui oleh Republik Indonesia. Jiwa nasionalisme akan bangkit setelah mengetahui bahwa Indonesia akan kembali dijajah.

Percakapan Jenderal Soedirman dengan Ir. Soekarno

Adegan ini sering disalahartikan oleh beberapa pengamat sejarah. Hal tersebut dikarenakan anggapan bahwa Soekarno seharusnya menepati janji. Janji yang dimaksud adalah bahwa Soekarno akan ikut bergerilya, apabila Belanda kembali menyerang. Soedirman menilai bahwa pemerintah kolonial Belanda dapat saja membunuh Soekarno. Hal tersebut diperkuat posisi Soekarno sebagai pemimpin Republik serta revolusi. Soekarno adalah tokoh politik, oleh karena itu ia memilih untuk tinggal agar dapat berunding. Soekarno juga membujuk agar Sang Jenderal istirahat karena kondisi kesehatan Jenderal Soedirman sedang buruk. Akan tetapi, Soedirman menolak untuk tinggal dan

memilih bergerilya bersama anak buahnya di hutan (Seri Buku Tempo: 2016).



Gambar 7. Soedirman saat bercakap dengan Soekarno 00:17:38-00:18:48

Menurut sejarawan Rushdy Husein, inilah awal keretakan hubungan antara pemimpin sipil dan pemimpin militer. Soalnya, Soekarno pernah berjanji akan memimpin perang gerilya bila Belanda menyerbu Yogyakarta. Wakil Presiden Moh. Hatta juga pernah mengatakan hal yang sama. Hatta mengatakan bahwa akan ikut berperang apabila Belanda menolak perdamaian. Namun, posisi memaksa mereka untuk tetap tinggal menjadi tawanan (Seri Buku Tempo: 2016).

Soedirman adalah tokoh nasionalis militer. Ia pernah mengingatkan Soekarno tentang janjinya, yakni Soekarno akan ikut bergerilya apabila Belanda kembali menyerang. Akan tetapi, Soekarno mengatakan Soedirman adalah tentara, tugasnya adalah tetap bersama pasukan. Namun, Soekarno memilih tinggal. Tujuan Soekarno adalah agar ia dapat berunding, sekalipun mungkin saja Soekarno akan dieksekusi oleh pemerintahan Kolonial Belanda (Seri Buku Tempo: 2016). Adegan dan fakta sejarah menandakan bahwa apa yang dikatakan oleh Dahrendorf bahwa seseorang yang memegang otoritas pada satu *setting*, tidak berarti menduduki posisi sebagai pemegang otoritas pada *setting* yang lain benar

adanya. Posisi Soekarno adalah ahli Presiden dan politik. Tidak bisa disamakan dengan posisi Soedirman yang notabene adalah militer. Nasionalisme soekarno dalam menghadapi kolonialisme Belanda adalah melalui meja perundingan. Sementara nasionalisme Soedirman ditunjukkan dalam medan perang. Meskipun tidak melalui konfrontasi frontal, Soedirman mampu mengguncang dunia dengan sikap dan strateginya.

Fakta sejarah atas konflik ideologi dan masa ini sering dinilai miris oleh beberapa ahli sejarah. Penyebab utamanya adalah sikap Soekarno yang terkesan melanggar janjinya. Akan tetapi, peneliti melihat dari situasi dan kondisi Republik saat itu. Pertama, membawa pemimpin sipil ke medan gerilya terlalu beresiko. Selain membutuhkan biaya banyak, dapat mengganggu diplomasi yang sedang berjalan. Misalnya, diperlukan masing-masing satu batalyon untuk mengawal Soekarno dan Hatta, sedangkan persenjataan dan pasukan tidak memadai. Konsentrasi pasukan akan terbagi, antara berperang atau melindungi Soekarno-Hatta. Kedua, Indonesia membutuhkan pemimpin sipil untuk berunding. Hal ini terkesan lebih logis daripada konfrontasi frontal. Persenjataan republik serta kualitas pasukan saat itu tidak memungkinkan. Persenjataan Republik Indonesia sangat terbatas. Tentara tidak hanya berasal dari TNI, tetapi juga warga sipil yang terpaksa ikut berperang. Semangat nasionalisme di medan perang tidak dapat membuat Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Karena itu, diperlukan diplomasi-diplomasi masif. Tujuannya untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara yang lebih santun dan mencegah skenario terburuk apabila tentara kalah perang.

Pernyataan Simon Spoor

Pasukan Kolonial Belanda dibawah pimpinan Simon Spoor berhasil menguasai Yogyakarta. Presiden sudah ditangkap, sehingga

garis komando dinyatakan lenyap. Oleh karena itu, pemerintahan Republik diklaim sudah tidak ada lagi. Kelompok yang tersisa adalah kaum nasionalis yang memilih untuk berjuang dan dicap sebagai kriminal bersenjata. Spoor memiliki kepentingan dengan pernyataan absurdnya dan menjadi pemegang otoritas dipuncak. Mengingat pernyataan Spoor tersebut tidak dapat dibantah oleh Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang serba terdesak. Senada dengan Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014), kelompok yang berada dipuncak dan dibawah ditentukan oleh kepentingan bersama. Posisi Belanda berada dipuncak setelah berhasil menancapkan kukunya di Indonesia. peralatan tempur canggih dan semangat kolonialisasi mendukung kemenangan Belanda tersebut. Ditambah lagi, Belanda membutuhkan daerah jajahan untuk pemenuhan kebutuhannya. Hal ini dikarenakan perekonomian Belanda hancur semenjak perang dunia ke-2.



Gambar 8. Diskusi Simon Spoor 00:22:45-00:23:03

Bidang persenjataan, perlengkapan militer, kemampuan dan pengalaman tentara Republik tidak sebanding dengan tentara Belanda. Akan tetapi, ada sumber kekuatan yang dapat dipakai mengimbangi kekurangan tersebut. Sumber kekuatan yang pokok adalah semangat kemerdekaan dan semangat perjuangan rakyat. Perang tidak hanya

senjata melawan senjata atau tentara melawan tentara. Akan tetapi juga melibatkan rakyat dalam melawan musuh (Simatupang: 1968). Karena itu, tidak berlebihan apabila peneliti beranggapan bahwa nasionalisme rakyat Indonesia masih kuat. Bahkan ketika Spoor menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. Maka, dapat dikatakan bahwa Spoor hanyalah melakukan spekulasi pragmatisi atas kepentingan-kepentingannya. Dibuktikan dengan nantinya, Belanda harus menarik pasukan dari teritorial Republik.

Pidato Tan Malaka

Tan Malaka menginginkan kemerdekaan Indonesia direbut tanpa kompromi dan diplomasi. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak dipandang rendah oleh bangsa penjajah. Tan Malaka menjadikan landasan testamen politik Soekarno, sebagai alasan untuk dirinya menjadi pemimpin. Tan Malaka berasal dari golongan komunis. Ditandai dengan lambang palu arit putih berlatar hitam dibelakangnya Tan Malaka juga mendapat dukungan kaum komunis, ditandai dengan pekik kemerdekaan setelah selesai berpidato.



Gambar 9. Pidato Tan Malaka 00:42:43-00:43:22

Selain bercita-cita mewujudkan Republik dari revolusi, Tan Malaka menginginkan Indonesia merdeka 100%. Tan Malaka pernah menegaskan keinginannya itu pada sebuah pertemuan di malam hari.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir dan KH. Agus Salim. Tan Malaka yang datang tidak diundang tiba-tiba berkata lantang: *“Kepada kalian para sahabat, tahukah kalian kenapa aku tak tertarik pada kemerdekaan yang kalian ciptakan. Aku merasa kemerdekaan itu tidak kalian rancang untuk kemaslahatan bersama. Kemerdekaan kalian diatur oleh segelintir manusia, tidak melahirkan suatu revolusi besar. Hari ini aku datang kepadamu, wahai Soekarno sahabatku. Harus aku sebutkan bahwa kita belum merdeka, karena merdeka harus 100%. Hari ini aku masih melihat, bahwa kemerdekaan hanyalah milik kaum elit, yang mendadak bahagia menjadi borjuis, suka cita menjadi ambtenaar. Kemerdekaan hanyalah milik kalian, bukanlah milik rakyat. Kita mengalami perjalanan yang salah tentang arti kemerdekaan. Apabila kalian tidak segera memperbaikinya, maka sampai kapanpun bangsa ini tidak akan pernah merdeka! Hanya pemimpinnya yang mengalami kemerdekaan, karena hanya merekalah adil makmur dirasakan. Dengarlah perlawananku ini! Karena apabila kalian terus bersikap seperti ini, maka inilah hari terakhir aku datang sebagai sahabat dan saudara. Esok, adalah hari dimana aku menjelma menjadi musuh kalian, karena aku akan tetap berjuang untuk merdeka 100%”* (Menuju Merdeka 100%: 2017).

Melihat dari pidato Tan Malaka diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kaum Nasionalis dan Komunis tidak sejalan. Menurut peneliti, sikap Tan Malaka tidak bisa dibilang nasionalisme. Menurut Otto Bouer (Waluya: 2009), nasionalisme adalah persamaan sikap dan tingkah laku dalam memperjuangkan nasib yang sama. Sikap Tan Malaka menurut peneliti, adalah sebuah protes terhadap pemerintahan yang sah. Protes Tan Malaka menuju klimaksnya pada pemberontakan Komunis di Kediri.

Dahrendorf (Ritzer dan Goodman: 2014), mengatakan bahwa kelompok kepentingan yang memegang

otoritas dan berada pada posisi subordinat memiliki kepentingan yang substansi dan arahnya berlawanan. Kelompok yang berada di puncak dan berada di bawah ditentukan oleh kepentingan bersama. Para elit politik masa revolusi dan rakyat memiliki kepentingan yang sama, yaitu memerdekakan Indonesia. Akan tetapi, pengalaman dijajah berabad-abad menjadikan rakyat "muak" dengan perundingan-perundingan. Rakyat kemudian berkumpul dalam asosiasi-asosiasi tertentu, demi mewujudkan keinginan rakyat saat itu. Asosiasi yang memiliki pendukung luas dan besar saat itu, salah satunya adalah PKI (Partai Komunis Indonesia). Sehingga kemudian lahirlah tokoh yang membawa pendapat atas situasi rakyat tersebut. Tan Malaka adalah salah satu tokoh tersebut.

Dalam adegan di film "Jenderal Soedirman" ini, Tan Malaka memanfaatkan testamen politik Soekarno. Testamen tersebut kemudian hari diketahui sebagai mandat Soekarno. Testamen diberikan juga pada beberapa tokoh yang lain selain Tan Malaka. Isi dari testamen ini adalah, apabila Soekarno-Hatta terbunuh, maka salah satu dari merekalah yang melanjutkan kepemimpinan Republik Indonesia. Akan tetapi, saat agresi militer Belanda ke II, Soekarno-Hatta hanya ditawan. Maka testamen tersebut belum dinyatakan sah untuk berlaku.

Cara berpikir Tan Malaka sangat logis, yaitu menginginkan kemerdekaan 100%. Akan tetapi, cara logis mereka tersebut terlampau naif dan tidak rasional menurut peneliti. Secara konotatif dalam adegan ini, karena tidak mau direndahkan oleh bangsa lain, Tan melakukan perlawanan. Fatalnya, perlawanan Tan berseberangan dengan kaum nasionalis Republik. Pada akhirnya, Tan Malaka harus menghadapi dua musuh dari dua penganut ideologi yang berbeda.

PENUTUP

Beberapa konflik terjadi dalam film yang telah dibahas di atas. Pertama, Konflik Nasionalisme sempit (Chauvinism) vs Fasisme. Secara denotatif, Sjahrir mengkonflikkan kedua ideologi tersebut. Sjahrir, selaku perdana menteri, tidak menyetujui pengangkatan Soedirman sebagai Panglima Besar. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh masalah karir Soedirman sendiri. Soedirman dianggap sebagai antek Jepang karena masa lalunya yang adalah bekas anggota PETA. Fakta sejarah membuktikan bahwa hubungan Soedirman dan Sjahrir pernah memburuk karena hal ini. Secara konotatif, Sjahrir tidak setuju ketika ada bekas penganut ideologi lainnya memikul tanggung jawab bangsa. Konflik Soedirman dan Sjahrir dipengaruhi oleh latar belakang ideologi. Sutan Sjahrir menganggap Soedirman adalah antek Jepang. Oleh karena itu, bagi Sjahrir Soedirman dapat menjadi penghalang kemerdekaan. Terlepas dari tanggung jawab yang dipikulnya, Sjahrir sangat tidak memberikan kesempatan bagi antek penjajah untuk berkuasa. Sjahrir takut negara ini menjadi negara fasis persis Jepang. Mengingat Soedirman adalah didikan PETA. Dari perspektif mitos, Sjahrir beranggapan bahwa Indonesia akan menjadi negara fasis apabila kolaborator Jepang diberikan posisi. Sehingga kolaborator Jepang harus disingkirkan. Salah satunya adalah Soedirman yang terpilih sebagai panglima besar. Sjahrir sebagai pemimpin kabinet yang nasionalis sangat tidak menyukai Jepang yang fasis. Akan tetapi, sekalipun Soedirman mendapat didikan Jepang, selama hatinya loyal pada NKRI latar belakang pendidikannya tidak masalah. Sebagai seorang Perdana Menteri dan politikus, Sjahrir harus bersikap jeli dan cerdas. Sjahrir tidak memahami bahwa tentara yang siap bertempur adalah eks-didikan penjajah.

Kedua, Konflik Nasionalisme vs Kolonialisme. Secara denotatif, konflik terjadi antara Republik Indonesia yang

baru merdeka dengan Kerajaan Belanda. Setelah perang dunia 2 selesai, Belanda mendapatkan dana untuk membangun negerinya yang hancur pasca PD (Perang Dunia) II. Namun Belanda menggunakan dana Marshall Plan (Amerika) untuk melakukan kolonisasi daerah jajahannya. Akan tetapi, kolonialisme Belanda mendapat pertentangan dari Sikap Nasionalisme Bangsa Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia telah merdeka dan memiliki pemerintahannya sendiri. Secara konotatif, Belanda menyalahgunakan dana untuk mewujudkan kolonialismenya. Akan tetapi, Indonesia telah merdeka, sehingga rencana Belanda mendapat perlawanan. Perlawanan ini datang dari kaum nasionalis Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, konsep kolonialisme Belanda mengalami hambatan. Sebagai gantinya, dana Marshall Plan ditarik kembali oleh Amerika. Mengingat dana yang diberikan oleh Amerika tersebut bukanlah dana kolonisasi, melainkan dana pembangunan. Oleh karena itu, Belanda bersedia melakukan perundingan dengan pihak Indonesia. Dilihat dari mitos yang dibangun, dengan semangat nasionalisme dan persenjataan seadanya, sikap nasionalisme Indonesia mampu mengalahkan upaya kolonialisme Belanda. Meskipun, Belanda mendapatkan suntikan dana dari Amerika. Dilihat dari banyaknya peralatan yang digunakan, Belanda benar-benar berniat kembali menjajah Indonesia.

Ketiga, Konflik Nasionalisme vs Komunisme. Secara denotatif, konflik nasionalisme dan komunisme mempengaruhi kebijakan. Kelompok nasionalisme memilih jalan perundingan untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan kelompok komunisme lebih menginginkan revolusi total. Revolusi total kaum komunis dianggap membahayakan konstitusi. Secara konotatif, kebijakan dipengaruhi oleh ideologi yang berkonflik. Sehingga penganut ideologi

nasionalisme yang lebih dominan berusaha untuk menjaga status quo-nya. Oleh karena itu, komunisme yang membahayakan konstitusi dianggap sebagai pemberontakan. Dengan kata lain, komunisme adalah ideologi yang tidak dominan di Republik Indonesia. Akan tetapi, bukan berarti komunisme memiliki penganut yang kecil. Pada tataran mitos, penganut nasionalisme dan komunisme memiliki ikatan yang ambigu. Di satu sisi, apabila ada ancaman dari luar mereka bersatu. Sisi lain, ketika ancaman tersebut mundur, mereka kembali berkonflik. Meskipun dalam film "Jenderal Soedirman" konflik antara kedua ideologi ini bersifat laten.

Keempat, konflik komunisme vs kolonialisme. Di tahap denotatif, konflik penganut kedua ideologi ini terlihat pada adegan pidato Tan Malaka. Tan mengatakan bahwa Indonesia harus merdeka seratus persen. Apabila tidak demikian, Indonesia akan direndahkan oleh penjajah. Konflik komunis dan kolonialis disampaikan secara laten dalam film Soedirman. Di level konotatif, merdeka seratus persen berarti revolusi total. Revolusi total yang dimaksud adalah tanpa melalui perundingan-perundingan. Apabila melalui perundingan lagi, Indonesia akan menjadi negara yang direndahkan. Isi perundingan Renville, Linggarjati dan Roem-Royen dinilai merendahkan harga diri Bangsa. Di tahap mitos, penganut komunisme beranggapan bahwa merdeka 100%, tidak akan direndahkan. Oleh karena itu, revolusi total harus tetap dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan pengakuan dan kebebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda, B.P. 1985. *"Panglima Besar Jenderal Sudirman: Sebuah Kenangan I Perjuangan"*. Jakarta: Almanak RI.
- Anderson, Benedict. 1983. *"Imagined Communities: Reflection On The Origin and Spread Of Nationalism"*. London: The Thetford Press.

- Ardianto, Elvinaro dan Lukiati Komala Erdinaya. 2004. "Komunikasi Massa Suatu Pengantar". Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Barthes, Roland. 2010. "Imaji, Musik, Teks". Yogyakarta : Jalasutra.
- Effendy, Onong Uchjana.. 2000. "Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi". Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Fansuri, Hamsah. 2015. "Sosiologi Indonesia: Diskursus Kekuasaan dan Reproduksi Pengetahuan". LP3ES, Jakarta.
- Furnivall , J.S.1956. "Colonial Policy and Practise"
- Huru, Alberthine B.Y. 2016. *Makna Simbolik Makam Megalitik Di Kelurahan Prailiu Kabupaten Sumba Timur (Analisis Semiotika Roland Barthes)*.Kupang. Skripsi.
- Ian Craib. 1992. "Teori-teori Sosial Modern". Jakarta: CV. Rajawali
- Krampen, Martin. 1996. "Ferdinand de Saussure dan Perkembangan Semilogi" dalam *Serba-Serbi Komunikasi*. Penyunting: Panuti Sudjiman dan Aart van Zoest. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan. 2001. "Semilogi Roland Barthes". Magelang: Indonesiatara
- Lexy J. Moleong. 1996. "Metodologi Penelitian Kualitatif". Bandung; Remaja Rosdakarya,
- Liliweri, Alo. 2004. "Dasar-Dasar Komunikasi Antarbudaya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- McQuail, Dennis. 1997. "Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar". Jakarta: Erlangga.
- Nawa, Melkianus R. 2014. *Analisis Semiotika Foto Jurnalistik Tentang Kebakaran Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur Pada Surat Kabar Harian Pos Kupang Edisi 10 Agustus 2013*.Kupang. Skripsi.
- Novanda, Gilang. 2014. *Representasi Hegemoni Jejaring Sosial Twitter Pada Film Republik Twitter Karya Kuntz Agus (Analisis Semiotika John Fiske)*. Jogyakarta. Skripsi.
- Oedijo, et al. 1962. "Doktrin Revolusioner Indonesia". Surabaya: C.V. Narsih.
- Padjadjaran Poloma, Margaret M. 1994. "Sosiologi Kontemporer". Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Poloma, Margaret M. 2000. "Sosiologi Kontemporer". Jakarta: CV. Rajawali.
- Prenada Media, Nasril, Nasrullah .2009. *Teori-teori Sosiologi*, Bandung: Widya
- Pureklolon, T. Thomas. 2017. "Nasionalisme: Supremasi Perpolitikan Negara" Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Raho, Bernard. 2007. "Teori Sosiologi Modern". Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ritter, Herry. 1986. "Dictionary of Concepts in History. New York: Greenwood Press Zamroni. 2008. *Teaching Social Studies. A Reader*". Yogyakarta: Graduate Program The State University of Yogyakarta.
- Ritzer George dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta:
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2007. "Teori Sosiologi Modern" Jakarta: Prenada Media Group,
- Ritzer, George, Douglas J. Goodman. 2014. *Teori Sosiologi*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Ritzer, George. 2010. "Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samsuri. 2004. *Politik Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safira Insani Press.
- Simatupang, T.B. 1981. *Pelopop Dalam Perang Pelopop Dalam Damai*. Jakarta: Yayasan Pustaka Militer
- Snyder, L. L. 1964. *The Dynamic of Nationalism*. Princeton: D. Van Nostrand Co. Inc.
- Sobur, Alex. 2004. *Semiotika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

- Suhartono. 2001. *Sejarah pergerakan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep Dan Teori Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publising,
- Tatang M Amirin. 1991. "Menyusun Rencana Penelitian". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Waluya, Bagja. 2009. *Sosiologi 2 Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Siuarabaya: Erlangga.
- Wardaya, Baskara. 2002. "Nasionalisme Universal: Menjawab Ajakan "PascaNasionalis-nya Romo Mangun", dalam *Jurnal Iman, Ilmu, Budaya*. Jakarta: Yayasan Bhumiksara.
- Winardi. 2007. *Manajemen Konflik, (Konflik Perubahan Dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju
- Wirawan. 2010. *Konflik Dan Manajemen Konflik; Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika.
- 1985. *Sudirman Prajurit TNI Teladan*. Jakarta: Dinas Sejarah TNI-AD.
- 2017. *Tan Malaka (Senarai Karya Penting Tan Malaka)*. Yogyakarta: Narasi.